



Mukhamad Misbakhun

# Perlu Ada PP Atau Perpres

Cegah Kebocoran Dana dan Perkuat Ekonomi Desa

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan perlunya Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk koperasi desa/kelurahan merah putih. Regulasi ini krusial untuk memastikan keberhasilan program, mencegah potensi kebo-

coran dana, dan memperkuat fondasi ekonomi desa.

Menurut Misbakhun, payung hukum ini harus mencakup standar operasional, model bisnis yang jelas, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan standar

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

## Perlu Ada PP Atau Perpres

Sambungan dari halaman 1.

kompetensi SDM pengelola koperasi. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara kopdes merah putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar saling memperkuat ekosistem ekonomi desa, bukan tumpang tindih.

Mengingat skala program yang masif dengan lebih dari 80 ribu koperasi, Misbakhun mengingatkan akan potensi risiko kebocoran dana, salah alokasi, atau bahkan pembentukan koperasi fiktif. Untuk mengantisipasi ini, ia mengusulkan implementasi sistem pengawasan digital terpusat yang mampu memantau transaksi dan kesehatan koperasi secara *real-time*.

Selain pengawasan berba-

sis teknologi, penyiapan SDM pendamping dan pelatih oleh pemerintah juga dianggap vital. Misbakhun menyarankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan aktif dalam pendampingan manajemen risiko dan audit internal.

"Pengawasan ini harus melibatkan aparat pengawas internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit eksternal, serta kerja sama proaktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk pencegahan dan penindakan," tegas Misbakhun. Partisipasi aktif masyarakat desa dan media lokal juga perlu didorong untuk turut mengawasi.

Misbakhun optimistis bahwa dengan pengelolaan yang cermat dan sistem pen-

gawasan yang kuat, program koperasi ini dapat menjadi fondasi kokoh bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. "Kebocoran dana, sekecil apa pun, adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Sistem pencegahan dan penindakan harus dibangun sekuat mungkin sejak awal," tuturnya.

Meski demikian, Misbakhun tetap mengapresiasi peluncuran lebih dari 80 ribu koperasi merah putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa. "Namun, dengan skala sebesar 80.081 koperasi yang melibatkan dana publik besar, pemerintah harus memastikan program ini berjalan dengan tata kelola yang baik," pungkasnya. (ant)